



# Moratorium Pembangunan Hotel Diperpanjang Sampai 2016

Zonasi bisnis pembangunan hotel akan diatur lewat rencana detail tata ruang.

L.N. Idayanie  
[idayanie@tempo.co.id](mailto:idayanie@tempo.co.id)

YOGYAKARTA — Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Hari Karyawan menyatakan moratorium pembangunan hotel akan dilakukan sampai 2016 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota Haryadi Suyuti. "Banyak hotel mengajukan perizinan,

tapi belum dibangun sejak akhir 2013," ujarnya kepada *Tempo* kemarin.

Kebijakan moratorium perizinan hotel berlaku sejak 2014. Semula, moratorium itu hanya berlaku paling lama dua tahun atau sampai 2015. Namun, saat ini, pemerintah belum akan mencabut larangan itu. "Kami tak mau terjadi penumpukan proyek. Sekarang investor yang sudah memegang

perizinan baru separah yang membangun," kata Hari.

Jumlah perizinan hotel yang diajukan sejak 2013 atau sebelum moratorium tercatat 104 hotel. Namun pemerintah kota hanya mengeluarkan izin untuk 77 investor guna membangun hotel dari jumlah itu. Sebanyak 16 investor belum membangun, 44 investor sedang membangun, serta 7 investor sudah selesai membangun hotel.

Menurut Hari, perpanjangan moratorium itu juga hasil komunikasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia

(PHRI) Yogyakarta. Kalangan pengusaha hotel khawatir maraknya pembangunan hotel menyebabkan tingkat hunian menurun.

Wakil Ketua Badan Legislasi yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti, mendukung keputusan itu. "Jika peraturan wali kota sudah berjalan efektif, kami tak perlu menyiapkan peraturan daerah pembatasan hotel," ujarnya.

Salah satu cara untuk membatasi pembangunan hotel adalah mengesahkan Rencana Detail Tata Ruang Kota, yang mengatur zonasi bisnis pembangunan hotel. "Kawasan-kawasan padat perhotelan atau berdekatan cagar budaya dilarang dibangun hotel baru."

Aktivis dari komunitas #JogjaAsat, Dodo Putra Bangsa, mengatakan pembangunan hotel sudah sangat mengkhawatirkan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Pembangunan tersebut sudah mengancam sumber daya air tanah. "Pemerintah seharusnya menelusuri kembali izin penguasaan air tanah di hotel-hotel," kata dia.

Catatan Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta memperkirakan, dalam 10 tahun ke depan kawasan kota akan kekeringan jika pemerintah tak mampu membatasi pembangunan hotel. Secara geografis, Kota Yogyakarta berbentuk seperti cekungan penampung air tanah.



**Cegah Korupsi.** Divisi Anti Corruption Learning Center (ACL) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar *training* dan simulasi pencegahan korupsi bagi pegawai Dinas Perizinan Kota Yogyakarta di dalam bus KPK, Yogyakarta, kemarin.

● PRIBADI WICKASOHO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005